

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI PENDIDIKAN TINGGI

(THE IMPLEMTATION OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN THE HIGHER EDUCATION)

Siswo Wiratno

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
e-mail: wiratno2002@yahoo.com

Diterima tanggal: 1/10/2012, Dikembalikan untuk revisi: 2/11/2012, Disetujui tanggal: 28/11/2012

Abstrak: Tujuan kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, kaitannya dengan kompetensi lulusan yang diharapkan oleh dunia kerja dan kompetensi pendukung lainnya. Permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan antara lain: 1) persiapan dan pelaksanaan program kewirausahaan dan peran unit baru yang berfungsi dan bertugas sebagai pengelola program kewirausahaan belum optimal; 2) penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kewirausahaan yang masih terbatas (sarana dan prasarana, mitra kerja, dana, dan tenaga dosen yang berkompetensi dalam memberi bekal keterampilan kewirausahaan). Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di berbagai perguruan tinggi belum dilaksanakan secara optimal, antara lain disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi unit pengelola kewirausahaan; 2) kompetensi lulusan perguruan tinggi masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dunia kerja, di mana diharapkan para lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi akademik, keterampilan berpikir, keterampilan manajemen dan keterampilan berkomunikasi. Di samping itu, lulusan belum cukup dibekali dengan keterampilan hidup (live skill), kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja serta belajar sepanjang hayat (life-long education).

Kata kunci: pendidikan kewirausahaan, perguruan tinggi, kompetensi lulusan, dan dunia kerja

Abstract: The aims of this study is to analyze the implementation of entrepreneurship education in higher education, in relation to the competencies of graduates as expected by labour market and other supporting competencies. Problems related to entrepreneurship education, among others include: 1) preparation and implementation of entrepreneurship education program as well as the role of a new unit responsible to manage the program is not optimal; 2) provision of facilities and infrastructure for entrepreneurial implementation is still limited (means and infrastructure, partners, funding and competent lecturers in the subject of entrepreneurial skills). The assessment results showed that: 1) implementation of entrepreneurship education in various higher education institutios is not yet optimal, partly due to the failure of entrepreneurial management unit in optimizing its role and function; 2) competency of higher education graduates has not fully meet the expectations of the labour market, as they are expected to have academic competency, thinking skills, management skills and communication skills. In addition, graduates are not equipped with adequate live skills, ability to adapt and socialize with the working environment and life-long education.

Keywords: entrepreneurship education, graduate competencies, higher education, and labour market

Pendahuluan

Secara nasional, implementasi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam perjalanannya, pendidikan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi akhir-akhir ini menjadi kajian di berbagai kesempatan, baik melalui diskusi, seminar, lokakarya, dan bahkan dijadikan *lesson learn* dengan menghadirkan sosok keberhasilan “alumni” dalam berwirausaha dan sekaligus sebagai *bench marking*. Dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi, permasalahan yang dihadapi antara lain adanya isu pengangguran. Hal tersebut diasumsikan ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu: kompetensi keahlian lulusan perguruan tinggi belum memenuhi kebutuhan pasar kerja, lulusan perguruan tinggi (prodi ilmu-ilmu sosial) kalah bersaing dengan lulusan dari program studi bidang keteknikan di dunia kerja. Sementara itu, lulusan program studi teknik banyak dibutuhkan namun kompetensi keahliannya masih belum memadai (Hendarman, 2011). Di samping itu, keragaman kesiapan masing-masing perguruan tinggi dalam mengelola kewirausahaan seperti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), pelaksanaan Kuliah Kerja Usaha (PKU), Program Magang Kewirausahaan (MKU), dan Inkubator Bisnis (INBIS) masih belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, hasil survei Litbang Media Group yang ditulis dalam Editorial Media Indonesia tanggal 30 April 2007 berjudul “Minimnya Minat menjadi Pengusaha” menunjukkan bahwa motivasi masyarakat Indonesia (termasuk lulusan perguruan tinggi) untuk menjadi pengusaha masih sangat rendah. Hasil survei tersebut sejalan dengan hasil Survei Tenaga Kerja Nasional 2001 hingga 2006 (dalam Balitbang, 2010a) menyatakan bahwa profil tenaga kerja Indonesia memang dikuasai pekerja. Dari total pekerja 25 juta orang, jumlah yang menjadi pengusaha kurang dari seperlimanya. Terhadap pertanyaan dalam survei yang sama yaitu “mayoritas orang Indonesia ingin menjadi apa?” diperoleh jawaban bahwa 70% ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS), hanya 20% ingin menjadi pengusaha. Angka ini jelas

mencerminkan kondisi riil yang selama ini dirasakan oleh para pencari kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2008) tingkat pengangguran terbuka di Indonesia telah mencapai 7,87%. Dari jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis pendidikan tertinggi menunjukkan bahwa lulusan diploma dan universitas mengalami kenaikan. Pekerja yang berasal dari lulusan diploma mencapai 2,79 juta orang (2,55%) dan pekerja yang berasal dari lulusan sarjana mencapai 4,66 juta (4,44%). Tampaknya, dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran yang berasal dari kalangan sarjana secara signifikan mengalami kenaikan dibanding dengan pekerja yang berasal dari diploma. Hal ini mengindikasikan bahwa kurang lebih 20% dari jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya belum mendapatkan pekerjaan.

Permasalahan yang diasumsikan terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan program pendidikan kewirausahaan, yaitu beragamnya perguruan tinggi dalam: 1) persiapan dan pelaksanaan program kewirausahaan dan peran unit baru yang berfungsi dan bertugas sebagai pengelola program kewirausahaan belum optimal; 2) penyediaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kewirausahaan masih terbatas (sarana dan prasarana, mitra kerja, dana, dan tenaga dosen yang berkompetensi dalam memberi bekal keterampilan kewirausahaan, sehingga bekal berbagai kompetensi belum memadai. Berkaitan dengan masalah tersebut, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi kaitannya dengan kompetensi lulusan dan kompetensi pendukung lainnya sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia kerja.

Kajian Literatur

Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Secara bebas kewirausahaan (*entrepreneurship*) dapat dimaknai sebagai jiwa, semangat, sikap, perilaku, dan potensi kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk

memperoleh keuntungan yang lebih besar” (Subijanto, 2012). Dengan kata lain, kewirausahaan dalam hal ini merupakan suatu kreativitas dan inovasi yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi untuk menghasilkan nilai tambah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain/masyarakat serta mendatangkan kemaslahatan bersama.

Pada hakikatnya, kewirausahaan merupakan sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata (bisnis) secara kreatif dan produktif. Seseorang yang memiliki potensi atau jiwa kewirausahaan, ia mampu melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan secara tepat dan mengambil keuntungan meraih peluang bisnis.

Secara epistemologis, kewirausahaan pada prinsipnya merupakan suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, motivator, tujuan, siasat/strategi, dan kiat-kiat dalam menghadapi tantangan hidupnya (Hunger dan Wheelen, 2003). Kewirausahaan (*entrepreneurship*) muncul manakala seseorang berani mengembangkan usaha-usahanya dan ide-ide barunya yang cerdas dan cermat dengan mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu, esensi kewirausahaan yaitu menciptakan nilai tambah melalui proses pengkombinasian berbagai sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda, sehingga mampu bersaing secara bebas di pasar bisnis.

Kewirausahaan menurut Sukidjo (2011) mencerminkan semangat, sikap, dan perilaku sebagai teladan dalam keberanian mengambil resiko yang telah diperhitungkan berdasar atas kemauan dan kemampuan sendiri. Orang yang memiliki sikap-sikap tersebut dikatakan sebagai wiraswasta atau wirausaha. Sementara itu, Suryana (2006) berpendapat bahwa kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang memperlajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya.

Percaya diri merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Berorientasi pada tugas dan hasil mencirikan bahwa seseorang wirausahawan harus berkonsentrasi pada tugas dan hasil dari apa pun pekerjaannya serta harus jelas hasilnya. Apa yang dilakukan seorang wirausahawan merupakan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Keberhasilan tersebut akan sangat ditentukan oleh motivasi berprestasi, berorientasi pada keuntungan, kekuatan dan ketabahan/keuletan berusaha, kerja keras, enerjik, dan inisiatif (Hunger dan Wheelen, 2003).

Lebih lanjut, mengambil risiko dicirikan oleh seseorang (wirausahawan) yang harus mengetahui peluang kegagalan (di mana sumber kegagalan dan seberapa besar peluang kegagalan), sehingga dapat meminimalis risiko. Karakter kepemimpinan dicirikan oleh seseorang (wirausahawan) yang dapat memberikan suri tauladan, berpikir positif, tidak antikritik, dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi (Hunger dan Wheelen, 2003). Kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya memberikan pengaruh kepada orang lain atau bawahannya, melainkan juga sigap untuk mengantisipasi setiap perubahan. Di samping itu, mampu memimpin untuk melakukan perubahan dengan menawarkan produk-produk baru dan menjadi pelopor dalam penciptaan produk yang unggul atau memberikan nilai tambah yang berbeda dibandingkan dengan para pesaing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan akan melibatkan pembentukan sikap/pola pikir (*attitude*), pengembangan keterampilan (*skill*), dan pembekalan pengetahuan (*knowledge*). Dengan kata lain, kewirausahaan merupakan potensi yang dimiliki seseorang untuk dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk pengalaman, tantangan, dan keberanian untuk mengambil resiko dalam bekerja dan/atau menciptakan pekerjaan.

Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan

Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan, terdapat dua kebijakan terkait dengan kewirausahaan, yaitu: 1) kewirausahaan

sebagai mata pelajaran di tingkat pendidikan menengah, dan sebagai mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi, serta 2) kewirausahaan sebagai keahlian yang mengacu pada standar kompetensi (Depdiknas, 2010).

Sekalipun nama mata pelajaran/mata kuliah, baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi berbeda-beda, namun pada hakikatnya memiliki kandungan makna yang sama. Sebagai contoh, di lingkungan sekolah menengah kejuruan (SMK), kewirausahaan pada umumnya dikenal dengan sebutan "unit produksi". Di kalangan LPTK (eks IKIP), pada bidang keahlian pengelolaan makanan, busana/kecantikan dikenal dengan "pengelolaan boga" atau "usaha boga". Di bidang busana, pengelolaan busana (termasuk usaha kecantikan), sedangkan pada universitas lebih dikenal dengan "inkubator bisnis" (inbis). Salah satu contoh pengembangan inbis yang dapat dijadikan model, yaitu model inbis Universitas Barawijaya, Malang (Balitbang, 2010b).

Program Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi

Beberapa pembekalan program Kewirausahaan yang dapat dilakukan di perguruan tinggi dalam mempersiapkan para lulusannya sebagai calon wirausaha baru sebagai berikut.

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)

Kedudukan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan bagian dari sistem pendidikan di perguruan tinggi yang telah diluncurkan semenjak tahun 2009. Dalam pelaksanaannya, PMW terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan yang sudah ada, antara lain dengan: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Kuliah Kerja Usaha (KKU) dan program kewirausahaan lain.

Tujuan penyelenggaraan PMW dimaksudkan untuk: 1) menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa; 2) membangun sikap mental wirausaha, yakni: percaya diri, sadar akan jati dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan keterampilan sosial; 3) meningkatkan kecakapan dan kete-

rampilan para mahasiswa khususnya *sense of business*; 4) menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, 5) menciptakan unit bisnis baru yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan 6) membangun jejaring bisnis antarpelaku bisnis, khususnya antara wirausaha pemula dan pengusaha yang sudah mapan. Alokasi dana PMW tidak seluruhnya untuk modal mahasiswa (Ditjen Dikti, 2009a).

Mekanisme pelaksana program PMW diawali dengan: 1) melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa; 2) identifikasi dan seleksi mahasiswa; 3) pembekalan kewirausahaan; 4) penyusunan rencana bisnis sambil magang di UKM (Ditjen Dikti, 2009a). Selanjutnya, untuk mendapatkan dukungan permodalan dalam rangka pendirian usaha baru mahasiswa wajib mengajukan rencana bisnis yang layak untuk diseleksi oleh "Tim Seleksi" yang terdiri atas unsur perbankan, UKM, dan perguruan tinggi pelaksana. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan operasional kewirausahaan.

Keberadaan kelembagaan yang bertanggungjawab atas program-program pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu pertimbangan penting bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memberikan dukungan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam usaha mewujudkan calon-calon pengusaha muda dan terdidik atau pengusaha muda pemula, menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dimulai melalui program Kuliah Kewirausahaan/KWU (Ditjen Dikti, 2010b).

Selama program PMW berjalan, perguruan tinggi bekerja sama dengan para pengusaha, baik dengan UKM Koperasi maupun perusahaan besar lainnya. Pengusaha dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan praktis kewirausahaan, dimulai dari pendidikan dan pelatihan, pema-gangan, menyusun rencana bisnis, dan pendampingan secara terpadu. Oleh karena itu, perlu dihindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara mahasiswa dan UKM pendamping. Sebaliknya, diperlukan adanya "sinergitas" antara jenis usaha yang dikembangkan mahasiswa dan jenis usaha yang dikembangkan oleh UKM pendamping.

Persyaratan pertama untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan PMW, perguruan tinggi pelaksana harus mempunyai lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian) serta pengembangan (penelitian dan pengembangan) program-program pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dan program lain yang terkait dengan hubungan antarlembaga. Lembaga yang dimaksud dapat bersifat formal struktural ataupun fungsional yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi (Ditjen Dikti, 2009b).

Program Kuliah Kewirausahaan (KWU)

Dalam usaha mewujudkan calon-calon pengusaha muda terdidik atau pengusaha muda pemula dan menumbuhkembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi dapat dimulai dengan program KWU. Penyelenggaraan KWU dimaksudkan sebagai upaya memperkenalkan dunia kewirausahaan agar dapat menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan bagi kalangan mahasiswa. Di samping itu, KWU dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kewirausahaan, pengalihan pengalaman berwirausaha dan mendorong tumbuhnya motivasi berwirausaha sebagai bentuk kegiatan awal mahasiswa calon wirausahawan baru (Ditjen Dikti, 2010b). Agar terjadi interaksi antarmahasiswa dari berbagai bidang studi dalam proses pembelajaran kewirausahaan, maka peserta KWU diharapkan berasal dari berbagai mahasiswa dari program studi/jurusan/fakultas lainnya.

Dalam upaya mewujudkan program tersebut, setiap perguruan tinggi diharapkan mampu: 1) meningkatkan pemahaman dan penjiwaan kewirausahaan di kalangan mahasiswa agar mampu menjadi wirausahawan yang berwawasan jauh ke depan dan luas berbasis ilmu yang diperolehnya; 2) mengenal pola berpikir wirausaha serta meningkatkan pemahaman manajemen (organisasi, produksi, keuangan dan pemasaran); dan 3) memperkenalkan cara melakukan akses informasi dan pasar serta teknologi, cara pembentukan kemitraan usaha, strategi dan etika bisnis, serta pembuatan rencana bisnis atau studi kelayakan yang diperlukan mahasiswa agar lebih

siap dalam pengelolaan usaha yang sedang akan dilaksanakan (Ditjen Dikti, 2010a).

Program Magang Kewirausahaan (MKU)

Program “magang kewirausahaan” merupakan kegiatan mahasiswa untuk belajar bekerja secara nyata (praktik) pada usaha kecil menengah, yang diharapkan dapat menjadi wahana penumbuhan jiwa kewirausahaan. Magang merupakan salah satu cara mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha. Selama magang mahasiswa bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan mitra, sehingga mampu menyerap berbagai pengalaman praktik, seperti: 1) memahami proses produksi yang dihasilkan secara utuh; 2) mengenal metode yang dilakukan baik dari aspek teknologi maupun organisasi; 3) mengenal pasar dari produk yang dihasilkan; 4) memahami permasalahan yang dihadapi dan cara mengatasi permasalahan; dan 5) berkembangnya sifat kreatif dan inovatif mahasiswa untuk bergerak di bidang wirausaha (Ditjen Dikti, 2010b).

Magang Kewirausahaan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman praktis kewirausahaan kepada mahasiswa dengan cara ikut bekerja sehari-hari pada usaha kecil dan menengah. Secara khusus tujuan MKU: 1) meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; 2) meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mahasiswa, baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman berwirausaha; 3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kalangan masyarakat di perusahaan; 4) memacu motivasi kewirausahaan mahasiswa yang berminat menjadi calon wirausaha; 5) membuka peluang untuk memperoleh pengalaman praktis kewirausahaan bagi dosen pembimbing mahasiswa; dan 6) menciptakan keterkaitan dan kesepadanan antara perguruan tinggi dengan usaha kecil dan menengah (Ditjen Dikti, 2010b).

Lebih lanjut, kegiatan MKU dilaksanakan dalam lingkup: 1) penetapan usaha kecil menengah yang layak untuk tempat magang (perusahaan mitra); 2) pembekalan magang mahasiswa oleh dosen pembimbing; 3) temu gagasan antara perguruan tinggi dengan pimpinan perusahaan mitra; 4) pelaksanaan MKU; 5) pemantauan dan pembimbingan oleh dosen

pembimbing dan perusahaan tempat magang; 6) evaluasi pelaksanaan magang oleh mahasiswa, pengusaha dan dosen pembimbing; 7) penyusunan *business plan* oleh mahasiswa peserta magang; 8) penulisan laporan magang oleh mahasiswa; dan 9) pembahasan hasil magang yang diikuti semua pihak yang terkait (Ditjen Dikti, 2009b).

Beberapa indikator pelaksanaan MKU dikatakan berhasil manakala: 1) pengusaha tempat magang merasakan manfaat MKU; 2) mahasiswa memperoleh pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman serta manfaat, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan yang berguna sebagai bekal untuk berwirausaha; dan 3) mahasiswa menjalankan tugas dengan disiplin dan mematuhi aturan perusahaan yang berlaku (Ditjen Dikti, 2010b).

Program Kuliah Kerja Usaha (KKU)

Jumlah lulusan perguruan tinggi (sarjana) yang mampu menciptakan lapangan kerja masih sangat terbatas. Hal ini diasumsikan, antara lain karena masih rendahnya kemampuan lulusan dalam berwirausaha. Naluri bisnis/jiwa kewirausahaan tidak akan tumbuh berkembang manakala tidak dilengkapi dengan pelatihan dan pembinaan secara intensif melalui kerja nyata berwirausaha.

Untuk menjadi wirausahawan, mahasiswa perlu dibekali kemampuan praktis yang mencakup keterampilan menerapkan iptek, keterampilan manajerial wirausaha dan pemasaran serta adopsi inovasi teknologi (Balitbang, 2010a). Pengalaman ini dapat diperoleh mahasiswa melalui Kuliah Kerja Usaha (KKU), di mana kemampuan praktis ditumbuhkembangkan dengan berperan aktif, antara lain membantu usaha rumah tangga atau usaha kecil menengah tempat mahasiswa bermitra. Oleh karena itu, kegiatan KKU, diharapkan dapat menumbuhkembangkan calon wirausahawan yang handal dan mandiri dari kalangan mahasiswa melalui proses aktif yang berprinsip pada keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan usaha kecil menengah. Tujuan khusus yang ingin dicapai dari KKU, yaitu: 1) berkembangnya budaya kewirausahaan di perguruan tinggi; 2) terwujudnya calon sarjana yang cendekiawan dan berjiwa

kewirausahaan serta sadar dengan masalah lingkungannya; dan 3) menumbuhkembangkan usaha kecil menengah yang memiliki daya saing tinggi dari segi kualitas produk/jasa, kinerja dan pemasaran (Ditjen Dikti, 2010a).

Mahasiswa yang melaksanakan KKU, selain belajar berwirausaha, juga menerapkan iptek yang dikuasai, seperti penyempurnaan proses produksi, peningkatan kualitas produk dan jasa, penyempurnaan manajemen usaha, maupun membenahan metoda pemasaran. Sambil membantu menata proses produksi atau pemasaran produk. Di samping itu, mahasiswa belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan mitra bisnisnya (pengusaha, pegawai, konsumen, tengkulak, penjual eceran dan grosir), sehingga mendorong tumbuhnya kedewasaan berpikir, berkomunikasi, dan bertindak.

Inkubator Wirausaha Baru (INWUB)

Inkubator Wirausaha Baru (INWUB) adalah suatu fasilitas fisik yang dikelola oleh sejumlah staf dan menawarkan suatu paket terpadu kepada alumni perguruan tinggi yang berminat menjadi wirausahawan dengan biaya terjangkau selama jangka waktu tertentu (2–3 tahun). Paket terpadu tersebut, antara lain meliputi: 1) sarana fisik atau ruang produksi dan fasilitas kantor yang dapat dipakai bersama; 2) kesempatan akses dan pembentukan jaringan kerja dengan jasa pendukung teknologi dan bisnis, sumberdaya teknologi dan informasi, sumber daya bahan baku, dan keuangan; 3) pelayanan konsultasi yang meliputi aspek teknologi, manajemen, dan pemasaran; 4) pembentukan jaringan kerja antar pengusaha, dan 5) pengembangan produk penelitian untuk dapat diproduksi secara komersial (Ditjen Dikti, 2010a).

Sebagai contoh rintisan inkubator wirausaha baru atau inkubator bisnis yaitu Universitas Brawijaya (UB) Malang telah berhasil dalam menyelenggarakan program kewirausahaan dan sampai sekarang masih terus dikembangkan manajemennya secara profesional (Balitbang, 2010b). Model inkubator bisnis Universitas Brawijaya kiranya dapat dipergunakan sebagai salah satu *bench marking* bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Tujuan dibentuknya INWUB, yaitu untuk: 1) menciptakan lapangan kerja baru sehingga meningkatkan standar hidup golongan ekonomi lemah; 2) menciptakan UKM yang mandiri dan berlandaskan iptek untuk memperkuat struktur ekonomi nasional; 3) membantu alih teknologi dari teknologi konvensional ke teknologi mutakhir (*state of the art technology*) yang tepat guna termasuk teknologi hasil putaran (*spin off*) industri besar, perguruan tinggi atau lembaga penelitian; dan 4) mempercepat perkembangan kewirausahaan di Indonesia untuk mencapai pengembangan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan dalam menghadapi era perdagangan bebas (Ditjen Dikti, 2010a).

Berbagai komponen tersebut di atas, merupakan wujud nyata Pemerintah (Ditjen Dikti, 2010a) dalam mewujudkan lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, sampai saat ini hasil tersebut belum sesuai dengan tujuan penyelenggaraan dimaksud lebih dikarenakan masih dalam taraf pengembangan dan penyempurnaan di berbagai aspek yang mendukung terwujudnya sarjana berwirausaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan program dimaksud. Selanjutnya, evaluasi diri bagi penyelenggaraan program dapat dilakukan secara mandiri dan akan lebih tepat lagi jika hal tersebut dilakukan oleh sebuah organisasi independen untuk mengevaluasinya. Lebih lanjut, perlu juga dilakukan "*external audit*" dalam penyelenggaraan program kewirausahaan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Kurikulum Perguruan Tinggi

Kurikulum perguruan tinggi selalu dituntut untuk mengikuti perkembangan iptek dan tren kebutuhan dunia kerja. Sekalipun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengembangan institusinya (termasuk kurikulum), namun kecenderungan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi akan sama. Kompetensi lulusan merupakan hal yang wajib dikembangkan sesuai dengan ciri dan karakter perguruan tinggi itu sendiri. Di samping itu, kecenderungan dalam pemenuhan kompetensi lulusan perguruan tinggi,

kurikulum yang dirancang perlu berorientasi pada: 1) berbasis kompetensi, dimaksudkan agar perguruan tinggi menjadi individu-individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dituntut pekerjaan tertentu dan memiliki jiwa visioner yang mampu menerima berbagai tantangan, mampu melihat peluang, dan berani mengambil risiko, termasuk melatih menganalisis permasalahan dan mengambil keputusan dengan tepat sasaran; 2) memfasilitasi intensifikasi keterampilan, talenta, dan kreativitas; serta 3) program yang seimbang antara *hard science* dengan *soft science* (seni dan ilmu sosial) bagi lulusan perguruan tinggi (Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002).

Upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut, antara lain dapat dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan *link and match* di tingkat perguruan tinggi dengan melakukan prakarsa untuk mengkonversi pengetahuan kewirausahaan yang ada di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) ke masyarakat akademik. Pendidikan tinggi telah melakukan dan bahkan telah menjadi tradisi sebagai masyarakat keilmuan, yaitu melakukan kombinasi dari *explicit knowledge* ke *explicit knowledge* lainnya, yaitu proses mensistematisasikan konsep ke dalam pengetahuan. Konversi pengetahuan ini mencakup menggabungkan *body of knowledge* yang berbeda-beda sehingga diperoleh *new body of knowledge*; 2) *internalization* dari *explicit knowledge* ke *tacit knowledge*. Hal ini merupakan proses mewujudkan *explicit knowledge* menjadi *tacit knowledge*. Proses tersebut erat kaitannya dengan "*learning by doing*". Manakala pengalaman yang dimiliki individu digabungkan dengan *explicit knowledge*, kemudian diinternalisasikan melalui sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi sehingga terbentuk *tacit knowledge* (Balitbang, 2010a).

Tacit knowledge yang menjadi basis mental model merupakan aset yang sangat berharga bagi institusi. *Tacit knowledge* yang ada pada level individu harus disebarkan ke level institusi. Dengan penyebaran tersebut dimulailah suatu *new spiral knowledge creation*. Perguruan tinggi yang berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi unggulan dan banyak melahirkan *entrepreneur tacit knowledge* ini juga memberikan sumbangan

bagi terbentuknya *core competency*; 3) eksternalisasi, yaitu proses mengartikulasikan *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. Hal ini merupakan inti dari proses pembentukan pengetahuan, *tacit knowledge* diubah menjadi *explicit knowledge*.

Perguruan tinggi seharusnya proaktif melakukan dialog dengan komunitas yang memiliki *tacit knowledge* (dalam hal ini kalangan *entrepreneur*) dengan masyarakat akademik, sehingga akan menciptakan proliferasi pengetahuan (yang sifatnya *tacit*) dan akhirnya menjadi *explicit*. Mengundang para *entrepreneur* dan kalangan dunia usaha ke kampus untuk berbagi pengalaman secara berkesinambungan memungkinkan masyarakat akademik dapat mengkonstruksi pengetahuan kewirausahaan melalui metafora, analogi, konsep, atau model kewirausahaan yang eksplisit dan dapat dipelajari oleh siapapun; dan 4) sosialisasi, yaitu proses berbagi pengalaman (<http://www.suara-pembaruan.com/News/2004/02/27/index.html>).

Permagangan di industri atau kerja magang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan *tacit knowledge*, dari magang individu dapat melakukan observasi, imitasi, dan mempraktikkan apa yang telah dipelajarinya. Sampai saat ini masih terbatas mahasiswa atau dosen yang melakukan magang di industri dan sebaliknya, masih terbatas jumlah perusahaan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau dosen untuk melakukan “magang” atau kuliah kerja lapangan (KKL). Hal ini dapat diasumsikan bahwa pihak industri belum memperoleh sosialisasi program pendidikan kewirausahaan dari perguruan tinggi. Alasan yang cukup klasik dari industri dan yang masih sering ditemui bahwa magang ataupun KKL mengganggu proses industri dan bahkan adakalanya membebani perusahaan. Oleh karena itu, sosialisasi penting dilakukan dan seharusnya dengan adanya *CSR (corporate social responsibility)* oleh industri sudah merupakan keniscayaan bagi industri untuk berbagai (*sharing*) dalam hal peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara sinergi.

Dalam upaya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas kewirausahaan sehingga para lulusan perguruan tinggi berorientasi pada pencipta lapangan kerja

(*job creator*), daripada pencari kerja (*job seeker*), oleh karenanya perlu dilakukan usaha nyata. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan Program Mahasiswa Wirausaha (*Student Entrepreneur Program*) yang merupakan kelanjutan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan *Cooperative Education (Co-op)* yang mendukung terciptanya lulusan yang siap kerja dan menciptakan kerja. Hasil-hasil karya mahasiswa melalui kedua program tersebut belum ditindaklanjuti secara komersial menjadi embrio berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Dengan demikian, program penguatan kelembagaan yang mendorong peningkatan kreativitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha baru dengan basis Iptek perlu dikembangkan.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk menindaklanjuti program unggulan di perguruan tinggi perlu ditindaklanjuti dengan suatu program *star-up business*, di mana mahasiswa dibimbing dan diarahkan ke dunia nyata, yaitu wirausaha berbasis Iptek berbasis komersial (*profit-benefit*). Program ini sejalan dengan strategi Perguruan Tinggi dalam kurun waktu 2003-2010 (Depdiknas, 2010a). Program tersebut menekankan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi dalam suatu bidang ilmu tidak lagi mencukupi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin kompetitif. Di samping lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang tertentu, kemampuan lainnya seperti belajar sepanjang hayat, kemampuan menganalisis, mensintesis, kemampuan memanfaatkan peluang dengan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan (*entrepreneurial spirit*), diperlukan juga kompetensi *entrepreneurial*. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden tentang pengembangan ekonomi kreatif (Inpres Nomor: 6/2009).

Lulusan Perguruan Tinggi dan Daya Saing

Salah satu cara pendekatan dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang dianggap cukup signifikan, yaitu menumbuhkan dan membangkitkan etos kerja lulusan sebelum menjadi pimpinan organisasi/perusahaan dan/atau pendiri kewirausahaan. Pemahaman etos kerja berangkat dari pengertian etos (*ethos*) yang

secara etimologis terdapat tiga istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *ethic*, *ethics* dan *ethos*. *Ethic* diartikan sebagai standar moral atau nilai-nilai; *ethics* sebagai filsafat moral (*moral philosophy*) dan *ethos* bermakna watak atau *character* (Noah, 1979).

Etos kerja yang mencerminkan semangat juang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan, sedangkan nilai-nilai itu sendiri selalu berubah dan berkembang. Etos juga merupakan landasan ide, cita-cita, pikiran yang akan menentukan sistem tindakan. Hal ini, karena etos menentukan penilaian seseorang atas suatu pekerjaan, maka ia akan menentukan pula hasil-hasil yang akan dicapai secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Hal tersebut sesuai pendapat Halexandria (2004) bahwa etos kerja adalah sifat yang khas (*characteristic*) semangat seseorang atau kelompok terhadap suatu pekerjaan.

Hasil pendidikan yang bermutu pada hakikatnya berakhir pada kemampuan daya saing. Daya saing atau persaingan/kompetisi merupakan usaha untuk mengalahkan lawan atau berusaha melawan standar internal dan eksternal dalam mencapai tujuan. Lebih lanjut, Pettgrew (1993) mengemukakan bahwa persaingan pada dasarnya merupakan kemampuan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Perubahan dalam hal ini, yaitu adanya proses kemajuan yang terjadi di lingkungan perusahaan atau masyarakat sehingga pendidikan menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang atau karyawan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Garelli (2003) bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan sebagai upaya peningkatan pengetahuan bagi seorang pekerja merupakan dasar dalam persaingan.

Sementara itu, Israel (2001) mengatakan bahwa daya saing atau rivalitas merupakan perilaku pembawaan atau kualitas/potensi individu yang dimilikinya. Setiap orang tidak dapat menghindarkan dirinya dari kondisi bersaing yang terjadi di lingkungannya. Pada kesempatan lain, Ivancevich, et.al (1995) mengemukakan bahwa daya saing (*competitiveness*) menunjukkan posisi relatif seseorang, unit, perusahaan atau suatu negara dibandingkan dengan seseorang, unit, perusahaan, atau negara lain. Posisi relatif

seseorang tersebut menunjukkan bagaimana kedudukan seseorang dengan orang atau lembaga dengan lembaga lain yang berhubungan dengan keunggulan dengan yang lainnya. Keunggulan seseorang atau pemimpin memberikan peluang untuk keberhasilan mencapai tujuan pribadi atau tujuan organisasi. Salah satu faktor keunggulan tersebut dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk tingkat keterampilan (kompetensi) yang dimiliki seseorang atau pemimpin (Callon, 1996). Oleh karena itu, daya saing dalam kewirausahaan difahami sebagai kesanggupan individu atau wirausahawan dalam berkompetisi dengan wirausahawan lain dalam lingkungan kelompoknya, sebagai cerminan adanya indikator pengembangan diri yang memiliki, yaitu kemandirian, memiliki daya inovasi, dan keberanian menghadapi perubahan meskipun mengandung risiko.

Metode Kajian

Metode kajian ini dilakukan dengan cara sederhana melalui "analisis" dari berbagai dokumen sebagai sumber acuan yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan yang relevan dengan pendidikan Kewirausahaan, pembahasan kewirausahaan dari jurnal, Panduan Pelaksanaan Kewirausahaan, Teori pendukung, dan hasil kajian Pendidikan Kewirausahaan di perguruan tinggi, serta Hasil Penelitian Balitbang tentang Alternatif Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di perguruan tinggi.

Hasil Kajian dan Pembahasan Kompetensi Keahlian Lulusan Perguruan Tinggi

Komitmen Pemerintah yang secara eksplisit telah menjadi prioritas nasional dalam pembangunan pendidikan 2010-2014, yaitu pembangunan pendidikan diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh keselarasan antara ketersediaan tenaga pendidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan; dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja (Depdiknas, 2010a).

Paradigma pendidikan yang bersifat *supply driven* yang cenderung menghasilkan lulusan dalam jumlah banyak, sudah seharusnya ber-

geser menjadi *demand driven* yang lebih mempertimbangkan pada aspek permintaan dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi seperti *academic knowledge*, *skill of thinking*, *management skill* dan *communication skill*. Sinergitas keempat kompetensi tersebut akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapinya. Lulusan harus dibekali juga keterampilan hidup (*live skill*) dan kemampuan beradaptasi dengan kemampuan berkomunikasi bergaul dan berinteraksi dalam masyarakat ilmiah dan masyarakat profesi; kemampuan untuk bekerja dalam kelompok; kemampuan untuk menggunakan khasanah pengetahuan; memiliki integritas pribadi, moral dan etika profesi yang tinggi (*soft skill*).

Dari tahun ke tahun, jumlah pengangguran lulusan sarjana secara nyata lebih tinggi dibanding lulusan diploma. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sekurang-kurangnya sekitar 20% dari jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya belum mendapatkan pekerjaan tetap. Atas dasar tersebut, ada kecenderungan bahwa lulusan perguruan tinggi pada umumnya sebagai pencari kerja (*job-seeker*) daripada pencipta kerja (*job creator*). Di samping itu, aktivitas kewirausahaan masih relatif rendah dan cukup bervariasi antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Aktivitas kewirausahaan dimaknai sebagai individu aktif dalam memulai bisnis baru dan dinyatakan dalam persen total penduduk aktif bekerja. Semakin tinggi indeks aktivitas kewirausahaan (*entrepreneurship activity*) maka semakin tinggi *entrepreneurship level* suatu negara (Boulton dan Turner, 2005 dalam Hendarman, 2011).

Dalam mengantisipasi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan tenaga kerja, perlu dilakukan *update* analisis kebutuhan dunia kerja yang mencakup dimensi kualitas/kompetensi dan kuantitas lulusan terhadap proyeksi kebutuhan DUDI. Proyeksi kebutuhan harus mengacu pada karakteristik khusus dan potensi yang dimiliki oleh potensi masing-masing daerah dan kebutuhannya. Untuk menjawab persoalan tersebut salah satunya diperlukan program penguatan relevansi antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga

kerja sesuai dengan pasokan (*supply driven*) maupun permintaan (*demand driven*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi lulusan perguruan tinggi masih belum sepenuhnya memenuhi harapan dunia kerja. Agar kebutuhan dunia kerja dapat terpenuhi, maka para lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa kompetensi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni (Ipteks) yaitu berupa kompetensi akademik, kompetensi berpikir, kompetensi manajemen dan kompetensi berkomunikasi. Di samping itu, lulusan hendaknya dibekali dengan keterampilan hidup (*live skill*), kompetensi beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja serta kemauan belajar sepanjang hayat (*life-long education*).

Pemenuhan berbagai kompetensi tersebut nampaknya akan mengalami tantangan manakala “peluang bisnis” bagi tamatan perguruan tinggi tidak seimbang dengan jumlah lulusan yang berpotensi untuk melakukan bisnis. Idealnya, peluang bisnis harus diciptakan oleh lulusan perguruan tinggi itu sendiri, namun perangkat pendukung lainnya perlu disinergikan dengan DUDI dalam wujud jejaring kerja sama (*networking*) yang dapat mewujudkan suasana timbal balik dalam wujud saling pengertian (*mutual understanding*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).

Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan

Kondisi lulusan program studi dengan pengembangan kurikulum yang digunakan sampai saat ini, memiliki keterkaitan yang rendah dengan kebutuhan atau tuntutan dari *user* (*stakeholders*). Pendapat Antonius (2008) dalam Balitbang (2010a) bahwa fenomena tersebut didukung oleh data bahwa hampir sekitar 35% lulusan perguruan tinggi tidak terserap di pasar kerja, atau sekitar 322.750 pengangguran terdidik. Jumlah itu akan meningkat menjadi dua kalinya bila ditambah dengan mereka yang kini mengalami PHK, dan pada tahun 2008 mencapai 50,3%.

Tingginya angka pengangguran terdidik tersebut tidak lepas dari rendahnya etos kerja lulusan perguruan tinggi dan kurangnya *entrepreneurial mindset*. Lebih lanjut, Antonius (2008) dalam Balitbang (2010a) menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya pengangguran

terdidik antara lain kurang selarasnya perencanaan pembangunan pada sektor pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja, sehingga lulusan dari perguruan tinggi hanya sebagian yang terserap untuk pasar kerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu menerapkan konsep *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia ketenagakerjaan dengan pendekatan *market labour based*. Dalam konteks ini, program-program yang memungkinkan tumbuhnya jiwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* dalam lembaga pendidikan tinggi menjadi sebuah alternatif dalam menjawab fenomena seperti yang dijelaskan di atas.

Hasil penelitian Pendidikan Kewirausahaan Balitbang (2010a) menunjukkan bahwa kurikulum yang berorientasi kreatif dan pembentukan jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang dimaksudkan, yaitu: 1) kurikulum yang membentuk kompetensi agar lulusan menjadi individu-individu visioner yang mampu menerima berbagai skenario tantangan, melihat peluang dan berani mengambil resiko, termasuk melatih kemampuan mencerna permasalahan dan mengambil keputusan dengan tepat walaupun tanpa adanya panduan yang cukup; 2) kurikulum yang memfasilitasi intensifikasi keterampilan, talenta dan kreativitas; serta 3) kurikulum yang mengandung program yang seimbang antara *hard science* dengan *soft science* (seni dan ilmu sosial).

Untuk mewujudkan gagasan tersebut antara lain dapat dilakukan melalui: pertama, perguruan tinggi harus mau mengambil prakarsa mengkonversi pengetahuan kewirausahaan yang ada di dunia usaha ke dalam masyarakat akademik. Hal ini telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan menjadi tradisi sebagai masyarakat keilmuan yaitu melakukan *combination* dari *explicit knowledge* yang satu ke *explicit knowledge* lainnya, yaitu proses mensistematisasikan konsep ke dalam sistem pengetahuan. Konversi pengetahuan ini mencakup menggabungkan *body of knowledge* yang berbeda-beda, sehingga diperoleh *new body of knowledge*.

Kedua, *internalization* dari *explicit knowledge* ke *tacit knowledge*. Ini merupakan proses mewujudkan *explicit knowledge* menjadi *tacit knowledge*. Proses ini erat kaitannya dengan

"learning by doing". Ketika pengalaman yang dimiliki individu digabungkan dengan *explicit knowledge*, hal itu dapat diinternalisasikan melalui sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi maka terbentuk *tacit knowledge*. *Tacit knowledge* yang menjadi basis mental model itu merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. *Tacit knowledge* yang ada pada level individu harus disebarkan ke level organisasi. Dengan penyebaran tersebut dimulailah suatu *new spiral knowledge creation*. Perguruan Tinggi yang berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi unggulan dan banyak melahirkan *entrepreneur*, salah satunya disebabkan oleh kemauan dan kemampuan melakukan internalisasi pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat membentuk *tacit knowledge* pada komunitas akademik. *Tacit knowledge* ini juga memberikan sumbangan bagi terbentuknya *core competency* (Ditjen Dikti, 2010a)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Tinggi sedang mengembangkan sebuah Program Mahasiswa Wirausaha (*Student Entrepreneur Program*) yang meliputi program: Pendidikan Kewirausahaan (PMW, Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), *Cooperative Education (Co-op)* dan inkubator bisnis (INBIS) yang mendukung terciptanya lulusan yang siap kerja dan *job creator* (Ditjen Dikti, 2010b).

Hasil-hasil karya mahasiswa melalui kedua program tersebut belum ditindaklanjuti secara komersial menjadi sebuah *embrio* berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Program penguatan kelembagaan yang mendorong peningkatan kreativitas berwirausaha dan percepatan pertumbuhan wirausaha baru dengan basis Iptek masih perlu dikembangkan dan diperkuat sebagai lembaga yang berwenang dalam pengembangan kewirausahaan (Ditjen Dikti, 2010a).

Dalam upaya menindaklanjuti program kreatif mahasiswa dan program kerja usaha yang telah melahirkan karya-karya inovatif dan kreatif mahasiswa, maka perlu ditindaklanjuti dengan program *star-up business*, di mana sebaiknya mahasiswa dihantarkan dan dibawa dalam dunia nyata wirausaha berbasis Iptek yang komersial (*profit-benefit*). Program ini sejalan dengan Strategi Perguruan Tinggi jangka panjang 2003-

2010 (HELTS 2003-2010) yang menjelaskan bahwa, kompetensi lulusan dalam suatu bidang ilmu saja tidak lagi mencukupi untuk memasuki lapangan kerja yang semakin kompetitif. Lulusan harus pula memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis, kemampuan untuk memanfaatkan peluang dengan keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan (*entrepreneurial spirit*), sehingga diperlukan perubahan bukan saja pada proses pembelajaran tetapi juga pengembangan budaya dan spirit *entrepreneurial*. Hal ini sesuai pula dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif dengan enam sasaran utama tahun 2009-2015 (Depdiknas, 2010).

Atas dasar uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kewirausahaan di berbagai perguruan tinggi dalam tahap pelaksanaannya dalam hal persiapan dan pelaksanaan program kewirausahaan dan peran unit baru yang berfungsi dan bertugas sebagai pengelola program kewirausahaan belum optimal. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan kewirausahaan yang masih terbatas (sarana dan prasarana, mitra kerja, dana, dan tenaga dosen yang berkompetensi dalam memberi bekal keterampilan kewirausahaan. Lebih lanjut, dalam implementasi program kewirausahaan masing-masing perguruan tinggi belum memiliki standar minimal yang sama dalam operasionalisasi pelaksanaannya dan para alumni masih belum optimal menindaklanjuti/mewujudkan sebagai wirausaha sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan melalui pemagangan di mitra kerja selama mengikuti perkuliahan.

Pelaksanaan kewirausahaan akan lebih sempurna manakala perguruan tinggi memiliki jejaring kerja sama dengan DUDI untuk membentuk para lulusannya memiliki pengalaman langsung jenis bisnis yang akan dikembangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain dapat dilakukan melalui jejaring kerja dengan para alumni di mana mereka bekerja. Hal ini sebagai salah satu wujud kepedulian alumni terhadap almamater yang secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan sesama alumni.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pertama, kompetensi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dunia kerja. Diharapkan para lulusan perguruan tinggi memiliki berbagai kompetensi, antara lain *academic knowledge*, *skill of thinking*, *management skill* dan *communication skill*. Kedua, para lulusan perguruan tinggi diharapkan pula memiliki keterampilan hidup (*live skill*) dan kemampuan beradaptasi serta kemampuan bersosialisasi (*soft skill*) terhadap lingkungan kerja dan memiliki kemauan belajar sepanjang hayat (*life-long education*). Ketiga, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi masih belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan, di mana masing-masing perguruan tinggi belum memiliki standar minimal pelayanan yang sama dalam melayani mahasiswa yang mengikuti program pendidikan kewirausahaan. Keempat, beberapa perguruan tinggi telah berhasil dalam melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan kewirausahaan, misalnya Universitas Brawijaya Malang di mana dalam pelaksanaan tersebut berbagai sarana dan prasarana telah cukup memadai termasuk jejaring kerja dengan mitra kerja bagi mahasiswa serta dosen pengampu program Pendidikan Kewirausahaan. Perguruan tinggi swasta seperti Universitas Ciputra Surabaya juga telah dinilai berhasil karena sarana dan prasarana lebih memadai, terutama mitra kerja universitasnya sebagian besar berada dalam kawasan industri pemilik universitas Ciputra (perusahaan milik Ciputra) sehingga sekaligus dapat menerima lulusan universitas tersebut secara bertahap dan berkesinambungan. Bagi perguruan tinggi yang telah dan sedang menyelenggarakan program kewirausahaan pada umumnya memiliki kendala belum optimalnya unit baru yang khusus bertugas dan berfungsi sebagai pengelola kewirausahaan, serta masih belum efektifnya pemberdayaan unit konsultasi bisnis dan penempatan kerja (KBPK).

Saran

Atas dasar simpulan, maka disarankan agar perguruan tinggi: 1) memberikan materi Kewirausahaan lebih banyak praktik lapangan (*learning by doing*) dibandingkan pemberian materi yang sifatnya simulasi dalam kondisi yang tidak riil. Di samping itu, dalam membekali berbagai kompetensi, perguruan tinggi melakukan *update* kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja (*demand driven*) seperti *academic knowledge*, *analitical skil*, *managerial skill* dan *communication skill*; 2) memberikan keterampilan tambahan seperti keterampilan hidup (*live skill*) dan kemampuan beradaptasi serta kemampuan bersosialisasi (*soft skill*) terhadap lingkungan kerja dan memiliki kemauan belajar sepanjang hayat (*life-long education*); 3) mengusahakan standar pelayanan minimal dalam menyelenggarakan program pendidikan kewirausahaan sehingga pola penyelenggaraan kewirausahaan dapat mencapai sasaran secara optimal; 4) meningkatkan penerapakan Keputusan Presiden Nomor 6

Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif dengan segala komponen yang diperlukan, antara lain melalui: a) pembenahan dan pemberdayaan keberadaan unit baru sebagai unit pengelola program Pendidikan Kewirausahaan dan konsultasi bisnis dan penempatan kerja (KBPK) dengan merumuskan kebijakan agar masing-masing mahasiswa secara individu maupun pasangan/kelompok melakukan usaha “kewirausahaan” atau “pengelolaan usaha” sesuai bakat dan minatnya melalui pemberian “dana bergulir”; dan b) perguruan tinggi perlu merencanakan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan, dalam menyediakan infra struktur untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan “kewirausahaan” di berbagai program studi. Di samping itu, koordinasi dan kerja sama/kemitraan atau jejaring kerja dengan DUDI sebagai mitra kerja perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan serta memberdayakan alumni untuk melakukan jejaring kerja dan sinergi dalam dunia kewirausahaan.

Pustaka Acuan

- Anonim, Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan Perlu Dirumuskan. (<http://www.suarapembaruan.com/News/2004/02/27/index.html>) diakses pada tanggal 30 November, 2010.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Sakernas Februari 2008: Penduduk Usia Kerja di Indonesia menurut Pendidikan Daerah 2008. <http://www.nakertrans.go.id/pusdatin.html.3.291.pnaker>. Diakses 25 April 2009
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010a. *Laporan Hasil Penelitian Alternatif Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi*, bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta, Kemdiknas, Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2010b. *Pedoman Umum Pengembangan Model Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi*, Balitbang Kemdiknas bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, Malang.
- Callon, Jack D.1996. *Competitive Advantage Trough Information Technology*, Singapore, McGraw-HillBook Co.
- David Hunger. J. and Wheelen. Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*, ANDI: Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (HELTS 2003-2010)*. Kemendiknas. Jakarta.

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2009a. *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Dikti*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2009b. *Laporan PMW di Perguruan Tinggi (tidak dipublikasikan)*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2010a. *Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2010b. *Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan. Bab V. Panduan Pengelolaan Program Hibah DP2M Ditjen Dikti – Edisi VII*. Jakarta.
- Halexandria. 2004. (<http://Halexandria.org/dward> 333htm) diunduh pada tanggal 11 Juni 2009.
- Hendarman. 2011. Kajian Kebijakan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 17. No. 8. Edisi November 2011*, Balitbang, Kemdiknas, Jakarta.
- Ivancevich, John M., Donnely James H., Jr. James L Gibson. 1995. *Fundamental of Management*, USA: Richard D Irwin Inc.,.
- Israel, Giana E. 2001. *Competitiveness*. (<http://www.firelily.com/gender/giana>) diakses pada tanggal 12 Desember 2009.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Media Indonesia, 30 April 2007. Minimnya Minat Menjadi Pengusaha dalam *Editorial Media Indonesia* diunduh tanggal 1 Juni 2008.
- Stephane Garelli. 2003, *Competitiveness of Nations: The Fundamentals*, (<http://members.shaw.ca/compilerpress1/anno/gareel/Fundamentals.htm>), diunduh pada bulan Oktober 2009.
- Subijanto. 2012. Analisis Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol 18, No. 2 Edisi Juni 2012*, Balitbang, Kemdikbud.
- Sukidjo. 2011. Membudayakan Kewirausahaan. *WUNY Majalah Ilmiah Populer Tahun XII, Nomor 1, Januari 2011*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suryana. 2006. *KEWIRAUSAHAAN Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. (edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Webster Noah. 1979. *Webster's New Twentieth Century: Dictionary Unabridged*, USA: William Collins Publishers.